



LAKIP

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

**TAHUN
2024**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Email : bkad.pangandarankab@gmail.com

Website : bkad.pangandarankab.go.id

Jln.Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fak. (0265) 2640011

Cijulang 46394

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya seluruh program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 mengacu kepada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban (Akuntabilitas) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sumber daya dan kebijakan.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu cepat dan tanggap terhadap permasalahan sekaligus mampu untuk menyelesaikan masalah Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tetap menjalin sinergitas dalam Pengelolaan Keuangan antara Pengelola APBD dan Pengguna APBD, masyarakat maupun legislatif dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

3. Menjadikan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, beroperasi serta efektif dan efisien, mampu mendorong akuntabilitas publik pada Dinas / Badan / Kantor / Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan responsif terhadap aspirasi masyarakat guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata yang mendunia.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun redaksinya. Walaupun demikian mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang memerlukan.

Akhirnya, semoga segala upaya kami senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, seraya terus mendorong petunjuk dan pertolongan-Nya dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah menjadi komitmen bersama khususnya dalam bidang Pengelolaan Keuangan daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 31 Januari 2025

PI. KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN



IDI KURNIADI, S.IP., MM
Pembina, IV/a

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang diperuntukan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pengelolaan Keuangan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Bertugas untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas lain diberikan pimpinan sesuai tugas fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dari 2 (Dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 8 (Delapan) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut :

- a. Capaian sebesar 100% sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 25%.
- b. Capaian lebih dari 100% sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 25%.
- c. Capaian kurang dari 100% sebanyak 4 (empat) indikator kinerja atau 50%.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran 2021-2026 beserta perubahannya dan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Realisasi anggaran tahun 2024, apabila dikelompokkan per sasaran strategis dengan rata-rata capaian sebesar 50,33% dengan capaian kinerja dari 2 indikator

kinerja utama rata-rata 81,87% dengan demikian dapat dikatakan efisien terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.

Cijulang, 31 Januari 2025

PIK KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN



IDI KURNIADI, S.IP., MM
Pembina , IV/a



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1

2. Dasar Hukum 1

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Potensi Badan Keuangan dan Aset Daerah
..... 2

3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi 2

3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur BKAD 3

3.3. Potensi BKAD 4

3.4. Isu Strategis BKAD 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. PERENCANAAN 6

2.1.1 Rencana Strategis 2021-2026 6

a. Visi Dan Misi Kabupaten Pangandaran 6

b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran 7

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 9

2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2024 13

2.3 Penjanjian Kinerja Tahun 2024 14

2.4 Standar Penilaian Kinerja 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 22

3.2 Realisasi anggaran 50

BAB IV PENUTUP 56

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potensi BKAD	4
Tabel 2.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Pangandaran (2021-2026)	7
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) (2021-2026).....	11
Tabel 2.3	Perencanaan Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	14
Tabel 2.5	Kategori Penilaian Kinerja	21
Tabel 3.1.1	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3.1.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2024 (2021- 2026)	28
Tabel 3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (2021-2026).....	33
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (2021-2026)	40
Tabel 3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	49
Tabel 3.1.7	Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja	49
Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	50



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2025 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 mengacu pada :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- 9) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 12) Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 700/Kpts.13-BKAD.1/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Di Lingkup BKAD Kabupaten Pangandaran.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Keuangan dan Aset Daerah

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2023 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

3.1.1. Tugas Pokok

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi



serta pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

3.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Sumber Daya Manusia Aparatur BKAD

3.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran antara lain ditetapkan bahwa salah satu Perangkat Daerah dimaksud adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Subag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian.

Jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam tahun 2024 adalah 51 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Menurut status :

- 1) PNS : 24 orang
- 2) CPNS : - orang
- 3) Tenaga Honorer : 26 orang

b. Menurut Golongan :

- 1) Golongan IV : 5 orang
- 2) Golongan III : 19 orang
- 3) Golongan II : 1 orang
- 4) Golongan I : - orang

c. Menurut pendidikan :

- 1) Pasca Sarjana : 11 orang
- 2) Sarjana : 9 orang
- 3) Diploma : 2 orang
- 4) SLTA : 3 orang
- 5) SLTP : 0 orang
- 6) SD : 0 orang

b. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Jabatan :

- 1) DIKLATPIM II : 0 orang
- 2) DIKLATPIM III : 1 orang
- 3) DIKLATPIM IV : 2 orang

3.3. Potensi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa potensi yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Potensi BKAD

No	Bidang	Potensi
1.	Anggaran	Sumber Daya Manusia, Aplikasi SIPD, E-bend, Regulasi Pengelolaan Keuangan

2.	Perbendaharaan	Sumber Daya Manusia, Aplikasi E-bend, Regulasi Pengelolaan Keuangan
3.	Akuntansi	Sumber Daya Manusia, Aplikasi E-bend, Regulasi Pengelolaan Keuangan
4.	Aset	Sumber Daya Manusia, Aplikasi Sistem Informasi BMD, Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

1.4. ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang sedang di hadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan Akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

2.1.1 Rencana Strategis 2021 - 2026

Pada tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

a. Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

Visi Kabupaten Pangandaran dengan penjelasan sebagai berikut :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Adapun yang menjadi misi Bupati Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;

2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;

3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;

4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;

5) Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;

6) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai tatakelola yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui peningkatan pengelolaan keuangan (*Good Government*).

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran (2021-2026)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						
					2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	89,78	68	70	72	74	76	78
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4,5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
				Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	20	20	20	20	20	20
				Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	4,5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
				Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	20	20	20	20	20	20	20
				Indeks Kondisi Keuangan Daerah	5	6	6,5	7	7	8	8
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir

Kondisi awal berdasarkan hasil evaluasi penilaian Akuntabilitas kinerja Tahun 2024 untuk BKAD memperoleh nilai 70,90 atau predikat BB. Mengacu pada Surat Edaran dari Inspektorat, bahwa berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/226/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 bahwa hasil evaluasi



menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 67,98 atau predikat B.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut maka Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran disusun seluruhnya dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan indikator tujuan, indikator sasaran dan target kinerja yang baik (SMART), Target kinerja ditetapkan dengan baik, Renstra harus dijadikan acuan dalam dokumen perencanaan, Sasaran harus berorientasi hasil dan Indikator kinerja sasaran, program dan hasil (outcome) memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.124/BKAD/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penetapan Indikator



Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah menyusun Renstra yang didalamnya terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) (2021-2026)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET KINERJA					
						2021 (kondisi awal)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	$\frac{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKD (n-1)} - \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKD (n-2)}}{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKD (n-2)}} \times 100$	LHE SAKIP	68	70	72	74	76	78
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	5	5,5	5,5	6	6	6,5
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	20	20	20	20	20	20
		Indeks Transparasi Pengelaaan Keuangan Daerah	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	5	5,5	5,5	6	6	6,5
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	20	20	20	20	20	20



2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja Tahun 2024

No	Kebijakan	Program
1.	Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran	
3.	Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.	



No	Kebijakan	Program
4.	Efektifitas pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen yang profesional.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan dan administrasi BMD yang terintegasi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat perlu dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Perangkat Daerah yang tidak terarah.

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran. Perjanjian Kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian lengkap Perjanjian Kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala BKAD
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024



Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (2021-2026)

No	Sasaran		Satuan	Target
	Uraian	Indikator		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	74

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	22.077.644.550
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	97%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	97%	170.000.000
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	97%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	97%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	90.000.000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	80.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	16.347.874.550
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	16.259.874.550
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	55.000.000
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	11.000.000
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	11.000.000



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	82%	55.000.000
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	55.000.000
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	97%	283.350.000
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	165.850.000
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	117.500.000
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	94%	443.000.000
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15.000.000
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.000.000
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	18.000.000
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	195.000.000
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	0	2.352.070.000
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1.137.500.000
1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	490.300.000
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	165.000.000
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	259.270.000
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%	1.282.850.000
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	7.850.000



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	785.000.000
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	490.000.000
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	96%	1.143.500.000
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	475.000.000
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	28.500.000
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	285.000.000
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	355.000.000



Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (2021-2026)

No	Sasaran		Satuan	Target
	Uraian	Indikator		
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Indeks	6
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Indeks	20
		Indeks Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	6
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	Indeks	20
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Indeks	7
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	20
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	8.552.711.140
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%	7.354.687.340
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	564.643.200
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	565.214.100
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	458.438.200
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	471.747.100
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	472.474.200
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	616.353.100
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	968.147.400
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	1.506.070.500



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	637.972.500
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	329.136.940
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	329.136.940
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dokumen	289.088.360
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	146.264.800
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	90%	7.101.399.050
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	621.215.650
2.2.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	36 Dokumen	107.797.000
2.2.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	36 Dokumen	266.107.600
2.2.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8 Dokumen	190.919.000
2.2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	143.374.750
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	5.242.550.000
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	183.801.300
2.2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	345.633.750
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	85%	3.061.025.000
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9 Laporan	202.633.200
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	36 Dokumen	280.827.800



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	525.269.700
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	979.569.000
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	709.810.000
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	85 Orang	362.915.300
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	90%	329.344.317.360
2.4.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	16.000.000.000
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93 Laporan	277.986.576.260
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	27.107.741.100
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	8.250.000.000
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	1.009.442.200
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	110.657.800
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	898.784.400
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	100%	5.320.000.000
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100%	5.320.000.000
		Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	300.000.000
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	750.000.000
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	-



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	400.000.000
3.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2.500.000.000
3.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	850.000.000
3.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	250.000.000
3.1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	270.000.000

2.5 Standar Penilaian Kinerja

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu:

Tabel 2.5
Kategori Penilaian Kinerja

No	Rentang Nilai Persentase	Kategori Capaian
1.	91 sampai dengan ≥ 100	Tercapai / Berhasil
2.	71 sampai dengan 90	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
3.	51 sampai dengan 70	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
4.	≤ 51	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Strategis dilakukan dengan :

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.1

Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Keuangan			234.007.155.038		117.773.076.955		50,33
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (2023-2026)	Nilai LHE AKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*	74	7.871.718.644	70,9	7.264.075.842	95,81	92,28
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	7.871.718.644	93%	7.264.075.842	97,89%	92,28
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%		100%		100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95%		95%		98,96%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	97%		97%		100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	97%	65.288.400	97%	56.801.386	98,98%	87,00
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	39.195.600	4 Dokumen	35.367.386	100,00	90,23
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.092.800	4 Laporan	21.434.000	100,00	82,15
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	4.625.034.000	90%	4.210.668.406	100,00	91,04

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/Bulan	4.600.000.000,00	24 Orang/Bulan	4.188.729.406	5,00	91,06
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	23.534.000	5 Dokumen	21.059.000	100,00	89,48
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	690.000	100,00	69,00
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	500.000	3 Laporan	190.000	100,00	38,00
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	82%	23.480.000	82%	20.796.000	100,00	88,57
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	23.480.000	12 Laporan	20.796.000	100,00	88,57
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	97%	226.194.120	97%	213.735.500	100,00	94,49
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	95.189.920	9 Paket	93.940.000	6,92	98,69
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	131.004.200	5 Dokumen	119.795.500	100,00	91,44
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	94%	392.795.000	94%	348.560.319	100,00	88,74
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	6 Paket	2.986.000	100,00	99,53
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	1 Paket	195.000.000	1 Paket	172.475.080	100,00	88,45
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	5 Paket	69.195.000	100,00	98,85
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.510.000	50,00	93,88
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	116.795.000	100 Laporan	96.394.239	100,00	82,53
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	30%	279.500.000	0	277.109.000	73,33	99,14
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	219.500.000	25 Unit	217.109.000	100,00	98,91
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	50,00	100,00



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%	944.471.043	95%	867.312.328	100,00	91,83
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	9 Laporan	1.903.000	75,00	95,15
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	617.306.328	100,00	94,97
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.471.043	12 Laporan	248.103.000	100,00	84,83
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	96%	1.314.956.081	96%	1.269.092.903	100,00	96,51
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	803.906.081	28 Unit	764.257.087	80,00	95,07
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000	10 Unit	4.500.000	100,00	100,00
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	216.550.000	10 Unit	211.035.000	100,00	97,45
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	290.000.000	4 Unit	289.300.816	100,00	99,76
II	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan (2023-2026)	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran **	6		9,17		152,83	
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD **	20		20,00		100,00	
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah **	6		12,67		211,17	
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah **	20		10,00		50,00	48,87
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah **	7	226.135.436.394	0,82	110.509.301.113	11,71	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah ***	WTP		5,01		33,40	
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu ****	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir		31 Maret 2024		100,00	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	222.162.058.794	100%	106.925.777.616	100,00	48,13



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100%		100%		100,00	
		Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%		100%		100,00	85,20
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	4.345.698.170,14	100%	3.702.368.148	100,00	
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	300.890.000	100,00	95,68
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	292.700.000	100,00	93,07
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	512.540.000	36 Dokumen	464.380.000	100,00	90,60
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	262.740.000	36 Dokumen	237.390.000	100,00	90,35
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	234.400.000	100,00	95,75
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	229.200.000	100,00	93,63
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	800.852.000	2 Dokumen	714.048.000	100,00	89,16
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	6 Dokumen	732.800.000	5,5 Dokumen	708.496.750	91,67	96,68
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	192.800.000	4 Dokumen	191.917.500	100,00	99,54
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	50.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.10	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	239.346.242,14	12 Dokumen	176.344.848	100,00	73,68
2.1.11	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	45.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.12	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	391.059.928	36 Orang	152.601.050	100,00	39,02
2.1.13	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	90%	8.205.059.884	90%	7.461.474.394	100,00	90,94
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	538.249.000	12 Dokumen	534.543.600	100,00	99,31
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	538.249.000	12 Dokumen	534.543.600	100,00	99,31



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.2.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	36 Dokumen	211.661.000	36 Dokumen	199.434.250	100,00	94,23
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	7.245.459.884	12 Laporan	6.528.210.544	100,00	90,10
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	209.700.000	4700 Dokumen	199.286.000	100,00	95,03
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	85%	1.862.358.870	85%	1.853.303.298	100,00	99,51
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9 Laporan	105.580.000	9 Laporan	99.068.900	100,00	93,83
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	36 Dokumen	50.000.200	36 Dokumen	49.800.000	100,00	99,60
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	283.300.400	1 Laporan	281.350.000	100,00	99,31
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	810.000.030	1 Laporan	809.963.923	100,00	100,00
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	613.478.240	1 Dokumen	613.120.475	100,00	99,94
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	90%	206.597.120.670	90%	92.770.777.876	100,00	44,90
2.4.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	13.000.000.000	12 Laporan	12.681.597.221	0,00	97,55
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93 Laporan	181.371.553.887	93 Laporan	70.026.001.914	100,00	38,61

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	4.334.157.345	100,00	86,68
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	7.225.566.783	93 Laporan	5.729.021.396	100,00	79,29
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	1.151.821.200	100%	1.137.853.900	100,00	98,79
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	229.321.200	12 Dokumen	219.002.850	100,00	95,50
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	922.500.000	1 Dokumen	918.851.050	100,00	99,60
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	100%	3.973.377.600	100%	3.583.523.497	100,00	90,19
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100%	3.973.377.600	100%	3.583.223.497	100,00	90,18
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	3.973.377.600	100%	3.583.223.497	100,00	90,18
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	458.391.000	1 Laporan	313.030.070	100,00	68,29
3.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	748.627.750	6 Laporan	580.878.000	100,00	77,59
3.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1.308.861.350	12 Dokumen	1.278.638.927	100,00	97,69
3.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1.006.979.000	4 Laporan	960.158.000	100,00	95,35
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	450.518.500	1 Laporan	450.518.500	100,00	100,00

Sumber : (*) Inspektorat Kab. Pangandaran
(**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
(***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(****) Bidang Aset BKAD Kab. Pangandaran
(*****) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab. Pangandaran

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024

Tabel 3.1.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024
(2021-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	REALISASI
				2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	74	69,25	69,70
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6	9,166	-
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	20	-
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	6	12,672	-
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	20	10,00	-
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	7	0,815	-
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WDP	-
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	31 Maret 2023	31 Maret 2024-

Sumber : (*) Inspektorat Kab. Pangandaran
(**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
(***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(****) Bidang Aset BKAD Kab. Pangandaran
(*****) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab. Pangandaran

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	7.871.718.644	93%	7.264.075.842	97,89%	92,28
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%		100%		100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95%		95%		98,96%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	97%		97%		100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	97%	65.288.400	97%	56.801.386	98,98%	87,00
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	39.195.600	4 Dokumen	35.367.386	100,00	90,23
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.092.800	4 Laporan	21.434.000	100,00	82,15
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	4.625.034.000	90%	4.210.668.406	100,00	91,04
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/Bulan	4.600.000.000,00	24 Orang/Bulan	4.188.729.406	5,00	91,06
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	23.634.000	5 Dokumen	21.059.000	100,00	89,48
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	690.000	100,00	69,00
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	500.000	3 Laporan	190.000	100,00	38,00
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	82%	23.480.000	82%	20.796.000	100,00	88,57
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	23.480.000	12 Laporan	20.796.000	100,00	88,57
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	97%	226.194.120	97%	213.735.500	100,00	94,49
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	95.189.920	9 Paket	93.940.000	6,92	98,69
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	131.004.200	5 Dokumen	119.795.500	100,00	91,44

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	94%	392.795.000	94%	348.560.319	100,00	88,74
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	6 Paket	2.986.000	100,00	99,53
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.000.000	1 Paket	172.475.080	100,00	88,45
1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	5 Paket	69.195.000	100,00	98,85
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.510.000	50,00	93,88
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	116.795.000	100 Laporan	96.394.239	100,00	82,53
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	30%	279.500.000	0	277.109.000	73,33	99,14
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	219.500.000	25 Unit	217.109.000	100,00	98,91
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	50,00	100,00
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%	944.471.043	95%	867.312.328	100,00	91,83
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	9 Laporan	1.903.000	75,00	95,15
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	617.306.328	100,00	94,97
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.471.043	12 Laporan	248.103.000	100,00	84,83
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	96%	1.314.956.081	96%	1.269.092.903	100,00	96,51
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	803.906.081	28 Unit	764.257.087	80,00	95,07
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000	10 Unit	4.500.000	100,00	100,00
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	216.550.000	10 Unit	211.035.000	100,00	97,45
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	290.000.000	4 Unit	289.300.816	100,00	99,76

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	222.162.058.794	100%	106.925.777.616	100,00	48,13
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100%		100%		100,00	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%	4.345.698.170,14	100%	3.702.368.148	100,00	85,20
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%		100%		100,00	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	300.890.000	100,00	95,68
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	292.700.000	100,00	93,07
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	512.540.000	36 Dokumen	464.380.000	100,00	90,60
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	262.740.000	36 Dokumen	237.390.000	100,00	90,35
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	234.400.000	100,00	95,75
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	229.200.000	100,00	93,63
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	800.852.000	2 Dokumen	714.048.000	100,00	89,16
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	732.800.000	5,5 Dokumen	708.496.750	91,67	96,68
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	192.800.000	4 Dokumen	191.917.500	100,00	99,54
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	50.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	239.346.242,14	12 Dokumen	176.344.848	100,00	73,68
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dokumen	45.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	391.059.928	36 Orang	152.601.050	100,00	39,02
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	90%	8.205.059.884	90%	7.461.474.394	100,00	90,94



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	538.249.000	12 Dokumen	534.543.600	100,00	99,31
2.2.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	36 Dokumen	211.851.000	36 Dokumen	199.434.250	100,00	94,23
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	7.245.459.884	12 Laporan	6.528.210.544	100,00	90,10
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	209.700.000	4700 Dokumen	199.286.000	100,00	95,03
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	85%	1.862.358.870	85%	1.853.303.298	100,00	99,51
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9 Laporan	105.580.000	9 Laporan	99.068.900	100,00	93,83
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	36 Dokumen	50.000.200	36 Dokumen	49.800.000	100,00	99,60
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	283.300.400	1 Laporan	281.350.000	100,00	99,31
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	810.000.030	1 Laporan	809.963.923	100,00	100,00
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	613.478.240	1 Dokumen	613.120.475	100,00	99,94
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	90%	206.597.120.670	90%	92.770.777.876	100,00	44,90
2.4.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	13.000.000.000	12 Laporan	12.681.597.221	0,00	97,55

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93 Laporan	181.371.553.887	93 Laporan	70.026.001.914	100,00	38,61
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	4.334.157.345	100,00	86,68
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	7.225.566.783	93 Laporan	5.729.021.396	100,00	79,29
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	1.151.821.200	100%	1.137.853.900	100,00	98,79
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	229.321.200	12 Dokumen	219.002.850	100,00	95,50
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	922.500.000	1 Dokumen	918.851.050	100,00	99,60
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	100%	3.973.377.600	100%	3.583.523.497	100,00	90,19
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100%		100%		100,00	
		Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	3.973.377.600	100%	3.583.223.497	100,00	90,18
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	458.391.000	1 Laporan	313.030.070	100,00	68,29
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	748.627.750	6 Laporan	580.878.000	100,00	77,59
3.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1.308.861.350	12 Dokumen	1.278.638.927	100,00	97,69
3.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1.006.979.000	4 Laporan	960.158.000	100,00	95,35
3.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	450.518.500	1 Laporan	450.518.500	100,00	100,00

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (2021-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Jangka menengah	Realisasi s.d tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah*	78	69,70
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	6,5	9,166
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD**	20	20
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	6,5	12,672
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah**	20	10,00
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah**	8	0,815
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah***	WTP	WDP
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu****	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	31 Maret 2024

Sumber : (*) Inspektorat Kab. Pangandaran tahun 2024
(**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023
(***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2023
(****) Bidang Aset BKAD Kab. Pangandaran

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	7.871.718.644	93%	7.264.075.842	97,89%	92,28
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%		100%		100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95%		95%		98,96%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	97%		97%		100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	97%	65.288.400	97%	56.801.386	98,98%	87,00
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	39.195.600	4 Dokumen	35.367.386	100,00	90,23
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.092.800	4 Laporan	21.434.000	100,00	82,15
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	4.625.034.000	90%	4.210.668.406	100,00	91,04
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/Bulan	4.600.000.000,00	24 Orang/Bulan	4.188.729.406	5,00	91,06
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	23.634.000	5 Dokumen	21.059.000	100,00	89,48
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	690.000	100,00	69,00
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	500.000	3 Laporan	190.000	100,00	38,00
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	82%	23.480.000	82%	20.796.000	100,00	88,57
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	23.480.000	12 Laporan	20.796.000	100,00	88,57

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	97%	226.194.120	97%	213.735.500	100,00	94,49
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	95.189.920	9 Paket	93.940.000	6,92	98,69
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	131.004.200	5 Dokumen	119.795.500	100,00	91,44
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	94%	392.795.000	94%	348.560.319	100,00	88,74
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	6 Paket	2.986.000	100,00	99,53
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.000.000	1 Paket	172.475.080	100,00	88,45
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	5 Paket	69.195.000	100,00	98,85
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.510.000	50,00	93,88
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	116.795.000	100 Laporan	96.394.239	100,00	82,53
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	30%	279.500.000	0	277.109.000	73,33	99,14
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	219.500.000	25 Unit	217.109.000	100,00	98,91
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	50,00	100,00
1.8	KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%	944.471.043	95%	867.312.328	100,00	91,83
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	9 Laporan	1.903.000	75,00	95,15
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	660.000.000	12 Laporan	617.306.328	100,00	94,97
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.471.043	12 Laporan	248.103.000	100,00	84,83
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	96%	1.314.956.081	96%	1.269.092.903	100,00	96,51
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	803.906.081	28 Unit	764.257.087	80,00	95,07

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000	10 Unit	4.500.000	100,00	100,00
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	216.550.000	10 Unit	211.035.000	100,00	97,45
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	290.000.000	4 Unit	289.300.816	100,00	99,76
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	222.162.058.794	100%	106.925.777.616	100,00	48,13
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100%		100%		100,00	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%	4.345.698.170,14	100%	3.702.368.148	100,00	85,20
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%		100%		100,00	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	300.890.000	100,00	95,68
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	292.700.000	100,00	93,07
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	512.540.000	36 Dokumen	464.380.000	100,00	90,60
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	262.740.000	36 Dokumen	237.390.000	100,00	90,35
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	234.400.000	100,00	95,75
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	229.200.000	100,00	93,63
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	800.852.000	2 Dokumen	714.048.000	100,00	89,16
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	732.800.000	5,5 Dokumen	708.496.750	91,67	96,68
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	192.800.000	4 Dokumen	191.917.500	100,00	99,54
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	50.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	239.346.242,14	12 Dokumen	176.344.848	100,00	73,68

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dokumen	45.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	391.059.928	36 Orang	152.601.050	100,00	39,02
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	90%	8.205.059.884	90%	7.461.474.394	100,00	90,94
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	538.249.000	12 Dokumen	534.543.600	100,00	99,31
2.2.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	36 Dokumen	211.651.000	36 Dokumen	199.434.250	100,00	94,23
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	7.245.459.884	12 Laporan	6.528.210.544	100,00	90,10
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	209.700.000	4700 Dokumen	199.286.000	100,00	95,03
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	85%	1.862.358.870	85%	1.853.303.298	100,00	99,51
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9 Laporan	105.580.000	9 Laporan	99.068.900	100,00	93,83
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	36 Dokumen	50.000.200	36 Dokumen	49.800.000	100,00	99,60
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	283.300.400	1 Laporan	281.350.000	100,00	99,31
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	810.000.030	1 Laporan	809.963.923	100,00	100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	613.478.240	1 Dokumen	613.120.475	100,00	99,94
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	90%	206.597.120.670	90%	92.770.777.876	100,00	44,90
2.4.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	13.000.000.000	12 Laporan	12.681.597.221	0,00	97,55
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93 Laporan	181.371.553.887	93 Laporan	70.026.001.914	100,00	38,61
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	4.334.157.345	100,00	86,68
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	7.225.566.783	93 Laporan	5.729.021.396	100,00	79,29
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	1.151.821.200	100%	1.137.853.900	100,00	98,79
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	229.321.200	12 Dokumen	219.002.850	100,00	95,50
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	922.500.000	1 Dokumen	918.851.050	100,00	99,60
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	100%	3.973.377.600	100%	3.583.523.497	100,00	90,19
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100%	3.973.377.600	100%	3.583.223.497	100,00	90,18
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	458.391.000	1 Laporan	313.030.070	100,00	68,29
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	748.627.750	6 Laporan	580.878.000	100,00	77,59
3.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1.308.861.350	12 Dokumen	1.278.638.927	100,00	97,69

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1.006.979.000	4 Laporan	960.158.000	100,00	95,35
3.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	450.518.500	1 Laporan	450.518.500	100,00	100,00

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
(2021-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi s.d tahun 2024	Standar Nasional
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah*	69,70	-
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	9,166	-
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD**	20	-
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	12,672	-
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah**	10,00	-
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah**	0,815	-
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah***	WDP	-
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu****	31 Maret 2024	-

Sumber : (*) Inspektorat Kab. Pangandaran tahun 2023
(**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023
(***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2023
(****) Bidang Aset BKAD Kab. Pangandaran



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2024

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. 3.1.5.b Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2024

- 1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
 - a. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Untuk mencapai sasaran tersebut diterapkan satu indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.b.1
IKU 1.1 Nilai AKIP SKPD

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	74	69,70	94,19%

*) Penilaian tahun 2024

Dari tabel 3.1.5.b.1 pencapaian IKU 1.1 yaitu Nilai AKIP SKPD dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2024, mendapatkan skor 69,70 atau termasuk kategori nilai B, dengan demikian capaian terhadap IKU 1.1 adalah tidak memenuhi target.

Faktor pendukung/Keberhasilan tercapainya target Nilai AKIP SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dari :

- a. Perencanaan Kinerja, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah menyusun dokumen perencanaan, memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil yang artinya rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi



kinerja yang akan dicapai, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja.

- b. Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah baik dalam melakukan pengukuran kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, Pengukuran kinerja telah cukup dipahami oleh setiap unit kerja dan pegawai, dan memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik didukung adanya aplikasi internal SI PAMAN AKI dalam melakukan pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memiliki aplikasi Pangsi sebagai sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja individu serta aplikasi SI Genah sebagai sistem pengumpulan data kinerja dan monitoring capaian kinerja yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Pelaporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah menyusun laporan kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah mempublikasikan secara umum ke website OPD dan E-Sakip, telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan telah menyajikan analisa faktor penghambat, faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja serta solusi dari setiap sasaran/indikator kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja.
- d. Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.

Faktor penghambat/kegagalan dalam meraih target Nilai AKIP SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa indikator penilaian, diantaranya:

- a. Perencanaan Kinerja, yaitu :
 - 1) Belum terdapat pedoman/modul teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik;



- 2) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator SMART hal tersebut disebabkan masih terdapat target kinerja yang masih tidak mudah di capai (achievable) sehingga kualitasnya belum maksimal diantaranya pada indikator berikut :
 - a. Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
 - c. Indeks Penyerapan Anggaran Daerah, dan
 - d. Indeks Kondisi Keuangan Daerah
- 3) Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya contohnya pada PK Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yaitu pada :
 - Indikator kinerja "Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran", dengan target "6" sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai "10,3"
 - Indikator kinerja "Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan target "6" sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai "8,26"
- 4) Cascading belum sepenuhnya tergambar keselarasan antara Kondusif/Hasil yang akan dicapai pada seluruh level jabatan (sampai ke sub kegiatan).
- 5) Perencanaan kinerja masih on the right track namun belum seluruhnya target perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik.
- b. Pengukuran Kinerja, yaitu :
 - 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen pengukuran kinerja yang baik;
 - 2) Hasil pengukuran kinerja di Si Genah, Pangsi dan sistem merit belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam promosi, penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
 - 3) Hasil pengukuran kinerja di Si Genah, Pangsi dan Sistem Merit belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam penyesuaian perubahan strategi dan target kinerja, (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - 4) Notulensi monev triwulan 1 (satu) belum menjelaskan ringkasan hasil capaian kinerja triwulan 1 (satu) dan belum menjelaskan terkait penyesuaian anggaran serta permasalahan/kendala dan rekomendasi pimpinan dalam rapat kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja, yaitu :



- 1) Pelaporan kinerja belum dilakukan reviu atau dilakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit satuan kerja didukung dengan adanya paraf koordinasi;
 - 2) Pelaporan kinerja belum menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam PK Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yaitu pada :
 - Indikator kinerja "Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengaangaran", dengan target "6" sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai "10,3";
 - Indikator kinerja "Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan target "6" sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai "8,28"
 - 4) Pelaporan kinerja telah menyajikan perbandingan dengan standar nasional namun masih terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu belum adanya penjelasan bahwa sasaran strategis yang ada tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional;
 - 5) Pelaporan kinerja belum menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai.
- d. Akuntabilitas Kinerja, yaitu :
- 1) Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 - 2) Belum terdapat penilaian mandiri pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang dituangkan kedalam laporan hasil pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disertai dengan tindaklanjut atas rekomendasi hasil laporan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai perbaikan akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Solusi agar target nilai AKIP SKPD dapat menjadi lebih baik lagi maka perlu dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai berikut:



- a. Berkoordinasi dengan Tim SAKIP tingkat Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan pedoman teknis perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - b. Menetapkan kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART menantang dan realistis;
 - c. Menyusun Cascading yang menggambarkan perjenjangan kinerja sampai ke Sub Kegiatan;
 - d. Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
 - e. Memaksimalkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN dan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - f. Mendokumentasikan rapat monev triwulananan terkait capaian kinerja, rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil rapat, rekomendasi pimpinan terkait penyesuaian anggaran kedalam notulensi secara memadai;
 - g. Pelaporan kinerja agar dilakukan reviu secara berjenjang oleh tim penyusun dan juga pimpinan unit satuan kerja didukung adanya paraf koordinasi pada dokumen LAKIP.
 - h. Menggunakan informasi dalam laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
 - i. Pelaporan kinerja agar menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
 - j. Agar dalam pelaporan kinerja menginformasikan penjelasan bahwa sasaran strategis tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional;
 - k. Pelaporan kinerja agar menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai;
 - l. Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi atau menggambarkan kekuarangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
- b. Sasaran 2 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat
Untuk mencapai sasaran tersebut diterapkan satu indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.b.2



IKU 2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6	9,166	153,00%
Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	20	100%
Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	6	12,672	21,22%
Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	20	10,00	50%
Indeks Kondisi Keuangan Daerah	7	0,815	11,65%
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	20	5,01	25,05%
Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bñ setelah thn anggaran berakhir	31 Maret 2024	100%

*) Penilaian tahun 2023

1. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dari target 6 mencapai realisasi 9,166 dengan capaian 153,00%. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :
 - a. Faktor pendukung dari pencapaian target Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu sudah terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran
2. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD dari target 20, mencapai realisasi 20 dengan capaian indeks 100%. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :



- a. Faktor Pendukung dari pencapaian target Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yaitu besaran pengalokasian untuk belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sudah sesuai dengan alokasinya;
3. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Transparansi pengelolaan keuangan Daerah dari target 6 mencapai realisasi 12,672 dengan capaian indeks 21,22%. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan Daerah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :
 - a. Faktor pendukung dari pencapaian target Indeks Transparansi pengelolaan keuangan Daerah yaitu dengan sudah memiliki web site dan perbaikan fasilitas internet yang memadai serta ketepatan waktu dalam proses penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
4. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Penyerapan Anggaran Daerah dari target 20, mencapai realisasi 10,00 dengan capaian indeks 50%. Indeks Penyerapan Anggaran Daerah tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelemahan, diantaranya :
 - b. Faktor penghambat dari pencapaian target Indeks Penyerapan Anggaran Daerah yaitu disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk tersedianya dana untuk proses pencairan.
 - c. Solusi dari faktor penghambat diatas yaitu memangkas program dan kegiatan menjadi yang lebih prioritas dan difokuskan pada program dan kegiatan yang lebih prioritas. Serta mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan potensi dan proyeksi yang terukur dan mengalokasikan belanja yang efektif dan efisiensi yang prioritas.
5. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Kondisi keuangan Daerah dari target 7 mencapai realisasi 0,815 dengan capaian indeks 11,65%. Indeks Kondisi keuangan Daerah tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelemahan, diantaranya :
 - a. Faktor penghambat dari pencapaian target Indeks Kondisi keuangan Daerah yaitu Adanya Realisasi belanja menurun dipengaruhi oleh persediaan uang di kas daerah yang tidak mencukupi untuk proses pencairan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan.
 - b. Solusi dari faktor penghambat diatas yaitu meningkatkan sumber dan potensi dari Pendapatan Asli Daerah dan mengutamakan program dan kegiatan yang prioritas dalam pemenuhan kebutuhan belanja.



6. Dari pencapaian IKU yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dari target WTP, mencapai realisasi **WDP**. Untuk Tahun 2023 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mendapatkan Nilai WDP dengan indikator capaiannya baik yaitu "kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :
- a. Langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan WTP ini adalah dengan meningkatkan komitmen dan perbaikan sistem pengendalian internal.
 - b. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu, akurat dan handal demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.
 - c. Untuk target belanja karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang tidak bisa melaksanakan pembayaran sehingga pembelanjaan dibatasi untuk yang prioritas saja.
 - d. Kurangnya SDM khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan SKPD secara kuantitas sehingga menyebabkan kurangnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
 - e. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran.
 - f. Melakukan kaderisasi untuk SDM baru pengelola keuangan SKPD dan meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.
 - g. Pelaporan keuangan telah berbasis Akruwal (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
 - h. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

	SASARAN STRATEGIS	Efisien/Tidak efisien	Alasan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Efisien	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sudah bisa meminimalkan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sehingga tercipta akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Efisien	Adanya peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sehingga pengelolaan sumber daya sudah efisien dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.1.7 Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	Program	Program yang tidak menunjang
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja organisasi pada tahun 2024 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Keuangan			234.007.155.038		117.773.076.955		50,33
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	7.871.718.644	93%	7.264.075.842	97,89%	92,28
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%		100%		100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95%		95%		98,96%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	97%		97%		100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	97%	65.288.400	97%	56.801.386	98,98%	87,00
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	97%		97%		98,98%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	39.195.600	4 Dokumen	35.367.386	100,00	90,23
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.092.800	4 Laporan	21.434.000	100,00	82,15
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	4.625.034.000	90%	4.210.668.406	100,00	91,04
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/Bulan	4.800.000.000,00	24 Orang/Bulan	4.188.729.406	5,00	91,06
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	23.534.000	5 Dokumen	21.059.000	100,00	89,48
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	690.000	100,00	69,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	500.000	3 Laporan	190.000	100,00	38,00
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	82%	23.480.000	82%	20.796.000	100,00	88,57
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	23.480.000	12 Laporan	20.796.000	100,00	88,57
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	97%	226.194.120	97%	213.735.500	100,00	94,49
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	95.189.920	9 Paket	93.940.000	6,92	98,69
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	131.004.200	5 Dokumen	119.795.500	100,00	91,44
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	94%	392.795.000	94%	348.560.319	100,00	88,74
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	6 Paket	2.986.000	100,00	99,53
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.000.000	1 Paket	172.475.080	100,00	88,45
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	5 Paket	69.195.000	100,00	98,85
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.510.000	50,00	93,88
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	116.795.000	100 Laporan	96.394.239	100,00	82,53
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	30%	279.500.000	0	277.109.000	73,33	99,14
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	219.500.000	25 Unit	217.109.000	100,00	98,91
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	50,00	100,00
1.8	KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%	944.471.043	95%	867.312.328	100,00	91,83
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	9 Laporan	1.903.000	75,00	95,15
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	660.000.000	12 Laporan	617.306.328	100,00	94,97

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.471.043	12 Laporan	248.103.000	100,00	84,83
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	96%	1.314.956.081	96%	1.269.092.903	100,00	96,51
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	803.906.081	28 Unit	764.257.087	80,00	95,07
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000	10 Unit	4.500.000	100,00	100,00
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	216.550.000	10 Unit	211.035.000	100,00	97,45
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	290.000.000	4 Unit	289.300.816	100,00	99,76
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%		100,00	48,13
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100%	222.162.058.794	100%	106.925.777.616	100,00	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%		100%		100,00	85,20
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	4.345.698.170,14	100%	3.702.368.148	100,00	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	300.890.000	100,00	95,68
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	314.480.000	2 Dokumen	292.700.000	100,00	93,07
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	512.540.000	36 Dokumen	464.380.000	100,00	90,60
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	262.740.000	36 Dokumen	237.390.000	100,00	90,35
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	234.400.000	100,00	95,75
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	244.800.000	36 Dokumen	229.200.000	100,00	93,63
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	800.852.000	2 Dokumen	714.048.000	100,00	89,16
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	732.800.000	5,5 Dokumen	708.496.750	91,67	96,68

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	192.800.000	4 Dokumen	191.917.500	100,00	99,54
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	50.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	239.346.242,14	12 Dokumen	176.344.848	100,00	73,68
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dokumen	45.000.000	0	-	0,00	0,00
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	391.059.928	36 Orang	152.601.050	100,00	39,02
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	90%	8.205.059.884	90%	7.461.474.394	100,00	90,94
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	538.249.000	12 Dokumen	534.543.600	100,00	99,31
2.2.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	36 Dokumen	211.651.000	36 Dokumen	199.434.250	100,00	94,23
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	12 Laporan	7.245.459.884	12 Laporan	6.528.210.544	100,00	90,10
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	209.700.000	4700 Dokumen	199.286.000	100,00	95,03
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	85%	1.862.358.870	85%	1.853.303.298	100,00	99,51
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9 Laporan	105.580.000	9 Laporan	99.068.900	100,00	93,83
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	36 Dokumen	50.000.200	36 Dokumen	49.800.000	100,00	99,60
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	283.300.400	1 Laporan	281.350.000	100,00	99,31

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	810.000.030	1 Laporan	809.963.923	100,00	100,00
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	613.478.240	1 Dokumen	613.120.475	100,00	99,94
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	90%	206.597.120.670	90%	92.770.777.876	100,00	44,90
2.4.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	13.000.000.000	12 Laporan	12.681.597.221	0,00	97,55
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93 Laporan	181.371.553.887	93 Laporan	70.026.001.914	100,00	38,61
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	4.334.157.345	100,00	86,68
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	7.225.566.783	93 Laporan	5.729.021.396	100,00	79,29
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	1.151.821.200	100%	1.137.853.900	100,00	98,79
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	229.321.200	12 Dokumen	219.002.850	100,00	95,50
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	922.500.000	1 Dokumen	918.851.050	100,00	99,60
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	100%	3.973.377.600	100%	3.583.523.497	100,00	90,19
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100%	3.973.377.600	100%	3.583.223.497	100,00	90,18
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	458.391.000	1 Laporan	313.030.070	100,00	68,29
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	748.627.750	6 Laporan	580.878.000	100,00	77,59
3.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1.308.861.350	12 Dokumen	1.278.638.927	100,00	97,69

3.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1.006.979.000	4 Laporan	960.158.000	100,00	95,35
3.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	450.518.500	1 Laporan	450.518.500	100,00	100,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan semua pihak.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran 2022-2026 beserta perubahannya dan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Sedangkan permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Penyusunan anggaran dari awal perencanaan yang sudah ditetapkan belum selesai dengan perumusan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terdapat yang kurang sesuai dengan perencanaan, sehingga masih banyak pergeseran anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Untuk data perencanaan yang sudah menjadi dokumen yang disahkan dalam pelaksanaan anggaran mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan Perangkat Daerah belum sesuai dengan riil kebutuhan dilapangan.
5. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat selisih angka karena adanya perbedaan angka dari Perangkat Daerah Penghasil sehingga realisasi pendapatan belum sesuai.
6. APBD sebagai fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/subkegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran.
7. Adanya kegiatan yang muncul setelah ditetapkannya RKPD dan PPAS serta ada kegiatan yang bersifat mendesak.



8. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024 tidak mengalami perubahan anggaran sehingga ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan.
9. Sistem aplikasi penatausahaan yang masih baru dikenal oleh pengelola keuangan yaitu SIPD Penatausahaan sehingga harus dilaksanakan pembelajaran lebih awal lagi.
10. Kurangnya Sumber daya manusia pengelola keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dengan mengutamakan komitmen dan konsisten.
2. Perlu melakukan evaluasi bagi Perangkat Daerah yang belum sesuai dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.
3. Mengikuti kebijakan dengan melaksanakan pergeseran anggaran.
4. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah dalam penyusunan RKBMD supaya sesuai dengan kebutuhan riil lapangan.
5. Perlu dilakukan rekonsiliasi antara SKPD, bidang aset dan bidang akuntansi setiap bulannya.
6. Perlu dilaksanakan rekonsiliasi tersebut pada minggu pertama bulan berikutnya.
7. Melaksanakan APBD sebagai fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan pada tahun berkenaan dan melaksanakan APBD sebagai fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
8. Menyusun regulasi tentang perencanaan, penganggaran serta teknis pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan melaksanakannya sesuai aturan.
9. Melakukan pengembangan aplikasi untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan pencatatan yang lebih mudah dengan penambahan fasilitas internet yang memadai.
10. Melakukan kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia pengelola keuangan dengan melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan diklat teknis tentang pengelolaan keuangan.
11. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pangandaran.